HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 jam 11.00 WIB di Gedung DPR/MPR RI. Narasumber yang akan diwawancara adalah Ganjar Pranowo, SH. Beliau merupakan salah satu anggota Panitia Khusus Hak Angket dalam pengusutan Kasus Bank Century dan juga Wakil Ketua Komisi II RI dari Fraksi PDIP. Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Dengan No Anggota beliau adalah 365.

1. Bagaimana penggunaan hak angket terkait century pak?

Yang sudah-sudah saya pernah mengutarakan bahwa Panitia Angket Untuk Kasus Century menjadikan UU No. 6 Tahun 1954 dan UU No 27 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dan kita semua menjalankannya sesuai Tata Tertib DPR.

Tetapi pada prinsipnya, hak-hak DPR seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat hendak diatur lebih rinci dalam undang-undang, bukan lagi hanya dalam Tata Tertib DPR.

2. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 23 UU No. 6 tahun 1954 yaitu rapat dilakukan tertutup dan Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sedangkan ini sangat berlawanan dengan yang sudah terjadi selama ini. menurut bapak bagaimana ini?

Konsep terbuka dan tertutup sederhana saja. Rapat akan dilakukan tertutup jika ada hal-hal dari terperiksa yang menyatakan beberapa hal tidak bisa dinyatakan secara terbuka. Kalau demikian, kita lakukan rapat internal sebentar, kita undang yang bersangkutan dan tanya apa yang ditakutkan, kalau objektif dan rasional, ya akan dilakukan tertutup.

Rapat sidang terbuka, selain agar bisa diketahui publik juga dilakukan untuk mentradisikan dialog antara anggota yang dalam hal ini khususnya pansus. Memang tidak menutup kemungkinan dilakukan rapat tertutup. Apalagi jika memaksakan dilakukan terbuka toh pansus akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Cuma, jika alasan permintaan tertutup ini tidak cukup masuk akal tentunya pansus juga tidak akan menyetujuinya. Pokoknya tertutup ada rasionalitasnya.

Fraksi kami pun akan terus mengawal mekanisme sidang terbuka ini.

- 3. Masa kerja Pansus ini sudah berkali-kali diperpanjang, menurut pak ganjar apa keputusan ini sudah benar dengan diperpanjangnya masa kerja Pansus Century ini?**

Sudah sering saya ungkapkan bahwa Fraksi kami sepakat memperpanjang masa kerja tim, karena menurut saya jika tidak diperpanjang, kelanjutan kasus ini akan diserahkan kepada siapa.

- 4. Bukannya sudah ada KPK untuk menyelesaikan kasus ini?**

Dalam kasus Century, ada penyelesaian secara hukum dan politik. Berkaitan dengan hukum, telah ditangani KPK, dan KPK sudah

melaksanakan dengan menetapkan dua tersangka, yaitu, Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadriah. Sedang penyelesaian secara politik adalah DPR.

DPR segera mengusulkan hak menyatakan pendapat dan segera menguji ke MK kesalahan yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan sesuai dengan kesimpulan angket atau opsi C.

5. Fraksi bapak mendukung dengan hak menyatakan pendapat tersebut?

Kami mendukung tapi sangat hati-hati soal itu, agar tidak menjadi ajang jualan antar elit dan ditunggangi penumpang gelap demi meraih keuntungan di balik kasus ini.

Hak menyatakan pendapat terkait kasus tersebut berpotensi pada pemakzulan Wakil Presiden Boediono, Sekarang kalau bicara pemakzulan siapa sih yang diuntungkan, lagipula masa politiknya semua hampir habis.

Yang lebih relevan justru segera melimpahkan tersangka yang ada ke pengadilan sehingga semua bisa lebih jelas, tidak ada polemik yang terjadi di tingkat masyarakat soal kasus ini berlarut-larut.

6. Menurut bapak keputusan untuk memberikan talangan kepada Bank Century itu benar atau salah?

Sebenarnya Bank Century tidak layak diselamatkan. Ini lah yang menjadi persoalan mengapa sampai pada keputusan mengucurkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Setelah itu mereka mencari alasan sistemik.

7. Menurut bapak, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus Bank Century?

Fraksi saya dan beberapa fraksi menyebutkan sejumlah nama yang dianggap bertanggung jawab dalam pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun. Yaitu mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono (kini wakil presiden) dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) Sri Mulyani Indrawati.

8. Menurut bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlibat?

Saya tidak sependapat dengan pendapat beberapa pihak yang menyatakan Presiden tidak tahu dan tidak terlibat dalam persoalan Bank Century ini. Karena menurut saya pak SBY mengetahui proses pengambilan keputusan pengucuran dana talangan untuk Bank Century. Justru akan tidak wajar kalau Presiden tidak tahu